



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS SOSIAL
Jalan Supadio No. 16, Sungai Raya, Kubu Raya 78391
Laman : www.dinsos.kuburayakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD, S.Sos., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WASILUN, S.Ag., M.Pd.
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Raya, Januari 2026

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



WASILUN, S.Ag., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196708081999031010

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



MUHAMMAD, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197304062006041006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100%
1.	Meningkatnya Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100%
	a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	3 Dokumen
	b. Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD.	b. Jumlah Dokumen RKA – SKPD	1 Dokumen
	c. Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	c. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
	d. Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD.	d. Jumlah Dokumen DPA-SKPD.	1 Dokumen
	e. Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD.	e. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPPD	1 Dokumen
	f. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	f. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun.	5 laporan
	g. Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	g. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1 Laporan
	h. Terlaksananya penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	h. Jumlah Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	1 Dokumen
	i. Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	i. Jumlah Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data
2.	Meningkatnya Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	100%
	a. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	23 Orang/Bulan
	b. Terlaksananya Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	b. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan.	1312 Dokumen
	c. Tersedianya Laporan		

	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. d. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	c. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. d. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan 17 Laporan
3.	Meningkatnya Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. a. Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. b. Tersusunnya Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah SKPD. c. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	3. Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah. a. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. b. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD. c. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100% 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan
4.	Meningkatnya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. a. Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. b. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	4. Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. a. Jumlah Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian. b. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	100% 3 Dokumen 3 Orang
5.	Meningkatnya Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah. a. Tersedianya Bahan Logistik Kantor. b. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan. c. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. d. Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis	5. Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah. a. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan. b. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan. c. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	100% 17 Paket 4 Paket 130 Laporan

	pada SKPD	Konsultasi SKPD. d. Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	2000 Dokumen
6.	Meningkatnya Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. a. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	6. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah. a. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	100% 3 Unit
7.	Meningkatnya Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. a. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. b. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.	7. Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100% 24 Laporan 39 Laporan
8.	Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. a. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. b. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. c. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	8. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah. a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	100% 1 Unit 10 Unit 38 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		APBD
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		
a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	7.861.000,00	APBD

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	7.892.000,00	APBD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	7.587.000,00	APBD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	7.780.000,00	APBD
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	7.791.000,00	APBD
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.536.000,00	APBD
g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	7.510.000,00	APBD
h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	8.031.366,00	APBD
i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	9.200.000,00	APBD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.		
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.850.079.974,21	APBD
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.042.000,00	APBD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	1.374.000,00	APBD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.	1.383.000,00	APBD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.		
a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	1.400.000,00	APBD
b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	7.352.500,00	APBD
c. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	2.562.000,00	APBD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	4.266.000,00	APBD
b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	15.000.000,00	APBD
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.676.000,00	APBD
b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	12.760.000,00	APBD

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	48.908.000,00	APBD
d. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	4.952.000,00	APBD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		
a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	200.450.000	APBD
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	59.412.000,00	APBD
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	328.181.840,00	APBD
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	42.510.000,00	APBD
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan.	77.910.000,00	APBD
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	17.050.000,00	APBD
TOTAL	3.830.457.680,21	APBD

Sungai Raya, Januari 2026

PIHAK KEDUA,



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA

WASILUN, S.Ag, M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP-196708081999031010

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA

MUHAMMAD, S.Sos., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP-197304062006041006



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS SOSIAL
Jalan Supadio No. 16, Sungai Raya, Kubu Raya 78391
Laman : www.dinsos.kuburayakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRA HINDRIARSIH, SE.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN,
PERLENGKAPAN DAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU
RAYA.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : MUHAMMAD, S.Sos., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA.

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Raya, Januari 2026

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



MUHAMMAD, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197304062006041006

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA,
KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN DAN
UMUM DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA

IRA HINDRIARSIH, SE.
Penata
NIP 197705232009032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN DAN
UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100%
1.	Meningkatnya Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	1. Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah.	100%
	a. Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	a. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	2 Dokumen
	b. Tersusunnya Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah SKPD.	b. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD.	1 Laporan
	c. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	c. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2.	Meningkatnya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	2. Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	100%
	a. Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	a. Jumlah Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian.	3 Dokumen
	b. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	b. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	3 Orang
3.	Meningkatnya Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah.	3. Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah.	100%
	a. Tersedianya Bahan Logistik Kantor.	a. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	17 Paket
	b. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.	b. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.	4 Paket
	c. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	c. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	130 Laporan
	d. Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	d. Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	2000 Dokumen

4.	Meningkatnya Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. a. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	4. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah. a. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	100% 3 Unit
5.	Meningkatnya Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. a. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. b. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.	5. Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100% 24 Laporan 39 Laporan
6.	Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. a. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. b. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. c. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	6. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah. a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	100% 1 Unit 10 Unit 38 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

**Anggaran Keterangan
(Rp)**

1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

-

-

	b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	-	-
	c. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	-	-
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	a. Sub Kegiatan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.	-	-
	b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	-	-
	c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	-	-
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	-	-
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	-	-
	d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	-	-
	e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	-	-
	f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	-	-
	g. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	-	-
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.	-	-
	b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	-	-
	c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	-	-
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	-	-
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	-	-
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	-	-
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	-	-

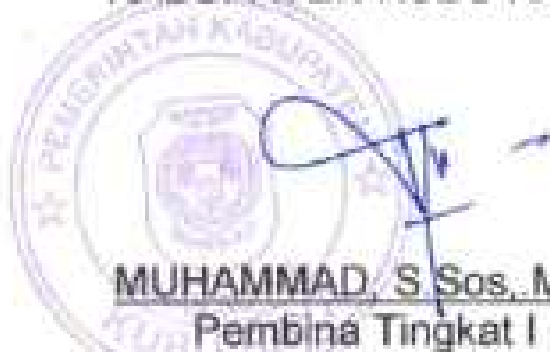
Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sungai Raya, Januari 2026

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



MUHAMMAD, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197304062006041006

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA,
KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN DAN
UMUM DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



IRA HINDRIARSIH, SE.
Penata
NIP 197705232009032002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS SOSIAL

Jalan Supadio No. 16, Sungai Raya, Kubu Raya 78391
Laman: dinsos.kuburayakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERLIA DAMAIYANTI, SH.
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS
SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : WASILUN, S.Ag., M.Pd.
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA.

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Raya, Januari 2026

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



WASILUN, S.Ag., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196708081999031010

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



HERLIA DAMAIYANTI, SH.
Penata Tingkat I
NIP 198310242006042007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Sosial dalam berbagai aspek. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. a. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota b. Terfasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan. c. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial. Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. a. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota b. Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial c. Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	100% 5 Lembaga 8 Orang 55 Orang
2	Meningkatnya Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Terkelolanya Pemeliharaan Anak – Anak Terlantar. a. Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar.	Persentase Anak-anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Persentase Anak-anak Terlantar yang dirujuk a. Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan Kabupaten/Kota.	100 % 500 Orang

	2. Terkelolanya Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS).		
	a. Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (DTKS).	a. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2000 Orang
	b. Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	b. Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	200 Orang
	c. Terpenuhinya Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	c. Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000 Keluarga
	d. Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	d. Jumlah Usulan Penindaklaayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	400 Keluarga

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 269.549.200	APBD
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.		
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp. 60.918.000	APBD
	b. Sub Kegiatan Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan.	Rp. 59.815.200	APBD
	c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp. 148.816.000	APBD

2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 913.627.000 APBD

Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar.

a. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar. Rp. 802.560.000 APBD

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Rp. 12.581.500 APBD

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rp. 35.737.500 APBD

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Rp. 30.399.000 APBD

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Rp. 32.349.000 APBD

TOTAL Rp. 1.183.176.200 APBD

Sungai Raya, Januari 2026

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



WASILUN, S.Ag., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19670808 199903 1 010

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



HERLIA DAMAIYANTI, SH.
Penata Tingkat I
NIP 198310242006042007



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS SOSIAL

Jalan Supadio No. 16, Sungai Raya, Kubu Raya 78391

Laman, www.dinsos.kuburayakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOGA PAKSI I, A.PI., M.Si.
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN, BANTUAN DAN REHABILITASI
SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WASILUN, S.Ag., M.Pd.
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA.

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Raya, Januari 2026

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA.


WASILUN, S.Ag., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196708081999031010

PIHAK PERTAMA,

KABID PELAYANAN BANTUAN DAN
REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA.


YOGA PAKSI I, A.PI., M.Si
Pembina
NIP 197510251999031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN, BANTUAN DAN
REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%
1.	Meningkatnya Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Persentase Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial.	100%
	a. Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.	a. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.	5 Orang
	b. Terpenuhinya Kebutuhan Sandang Per orang sesuai dengan standar minimal kewenangan Kabupaten/Kota.	b. Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	12 Orang
	c. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.	c. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota.	17 Orang
	d. Terlaksananya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota.	d. Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi keluarga Kabupaten / Kota	10 Orang
	e. Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisiki Mental Spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/kota.	e. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang
	f. Terlaksananya Pemberian Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis	f. Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta	50 Orang

	dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	gelandangan pengemis dan masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	
	g. Tersedianya Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis	g. Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang
	h. Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota.	h. Jumlah orang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang
	i. Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	i. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang
	j. Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	j. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang
	k. Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	k. Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang
2.	Meningkatnya Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.	100%
	a. Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota.	a. Jumlah Peserta dalam pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota.	50 Orang
	b. Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	b. Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota.	5 Orang

3.	Meningkatnya Persentase masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan sosial. Tertangani Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial. a. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota b. Terpenuhinya Kebutuhan Sandang Per orang sesuai dengan standar minimal kewenangan Kabupaten/Kota.	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial. Jumlah Korban Bencana Alam Sosial yang Mendapatkan Bantuan. a. Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten / Kota. b. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100% 206 Orang 30 Orang
4.	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. a. Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota a. Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.	5 Orang
5.	Meningkatnya Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. a. Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. a. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 136.473.000	APBD
a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial.		
- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp. 12.905.000	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang.	Rp. 9.739.000	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu.	Rp. 50.998.000	APBD
- Sub Kegiatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp. 2.000.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp. 10.653.000	APBD
- Sub Kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.	Rp. 2.606.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.	Rp. 1.000.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp. 21.170.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.	Rp. 2.762.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp. 9.816.000	APBD
- Sub Kegiatan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp. 2.900.000	APBD
b. Kegiatan Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Rp. 9.924.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.	Rp. 6.926.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	Rp. 2.998.000	APBD

2. Program Penanganan Bencana	Rp. 42.213.050	APBD
a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.		
- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan.	Rp. 22.043.050	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang.	Rp. 17.270.000	APBD
b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.		
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.	Rp. 2.900.000	APBD
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 1.500.000	APBD
a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.		
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa Kelurahan Asal.	Rp. 1.500.000	APBD
TOTAL	Rp. 180.186.050	APBD

Sungai Raya, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA.

KABID PELAYANAN BANTUAN DAN
REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA.


WASILUN, S.Ag, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196708081999031010


YOGA PAKSI I. A. PL. M. Si.
Pembina
NIP 197510251999031007